

Proyek Gedung Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Masuk Proses Lelang, Anggaran Ditaksir Mencapai Rp 70 Miliar



Sumber gambar:

<https://diskominfo.kalselprov.go.id/2024/06/13/dinas-pupr-kalsel-rencanakan-pembangunan-kantor-dinkes-kalsel/>

Dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bertitik pada satu lokasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Bidang Cipta Karya melakukan progres perencanaan tahap pertama pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Satu persatu gedung kantor Dinas provinsi di Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan mulai dibangun di antaranya Dinas Sosial, Kantor DPRD, dan saat ini Dinas Kesehatan sedang masuk dalam tahap pertama pembangunan.

Kantor baru Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru segera dibangun. Lokasi kantor ini berada di atas lahan seluas 1,93 hektare di Jalan Bina Praja, kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel.

Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah mengatakan, rencana pembangunan kantor baru Dinas Kesehatan masuk tahap pertama.

“Saat ini perencanaan dan akan masuk ke e-Katalog,” katanya.

Setelah selesai proses ini dan sudah ada pemenang tender, pembangunan kantor Dinas Kesehatan dilanjutkan tahap peletakan baru pertama.

Untuk tahap awal, Yulianti mengungkapkan alokasi anggaran gedung baru Dinas Kesehatan Kalsel sekitar Rp 22 miliar. Angka itu untuk struktur bangunan.

“Semoga prosesnya bisa cepat, dan Juli nanti sudah mendapat pemenang untuk pembangunan struktur,” harapnya.

Kepala Seksi Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman Air dan Bangunan, Irwan Yunizar menambahkan, total anggaran untuk pembangunan gedung baru Dinas Kesehatan Kalsel ditaksir mencapai Rp 70 miliar.

Menurutnya, andai perencanaan dimulai 2023 lalu, pembangunan bisa fokus pada fisik gedung tahun ini.

“Namun karena baru tahap pertama maka baru struktur bangunan yang difokuskan untuk tahun ini, dan tahun 2025 dipastikan selesai,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor memastikan seluruh kantor instansi Pemerintah Provinsi setempat akan migrasi secara bertahap ke Kota Banjarbaru. Ini menyusul berubahnya status Ibu Kota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

Saat ini, memang sebagian kantor instansi Pemprov Kalsel masih ada yang di Banjarmasin. Seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perdagangan.

“Kantor DPRD dan rumah dinas adalah dua pembangunan di antara yang masuk pencaangan pemerintah provinsi, kantor lain segera menyusul,” ujarnya.

Sahbirin bilang, kantor instansi terpusat di kawasan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel bertujuan memudahkan masyarakat mengurus administrasi.

Lantas, bagaimana nasib kantor instansi di Banjarmasin nanti?

Sahbirin belum bisa memastikan. “Kita lihat apa yang diperlukan oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk lain, bisa dikerjasamakan atau bagaimana nantinya,” tuturnya.

Sumber berita:

1. <https://diskominformc.kalselprov.go.id/2024/06/13/dinas-pupr-kalsel-rencanakan-pembangunan-kantor-dinkes-kalsel//>, 13 Juni 2024.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/06/14/proyek-gedung-dinkes-kalsel-masuk-proses-lelang-anggaran-ditaksir-mencapai-rp-70-miliar>, 14 Juni 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- ✿ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- ✿ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
- ✿ Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Struktur APBD

